

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA: PENINGKATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA PROVINSI SE-INDONESIA

Prawidya Hariani RS
FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: prawidyahrs@gmail.com

ABSTRACT

The Fiscal Decentralization Policy is an implementation of Regional Autonomy in Indonesia after the 1998 Economic Reform with the aim of achieving equal distribution of economic development in all regions, then will encourage economic growth.

The main objective is to estimate and prove how regional transfer variables such as DID, DAU, DAK, and DD can influence the Human Development Index (HDI) as an indicator of economic development. Furthermore, IPM can influence economic growth with the 2SLS model. The data used is pooling data, where the cross section is all provinces while the time series uses 12 years data (2005-2016). Estimation method with the least squares method (OLS) and autoregressive model that uses E-Views 8 software.

The results to indicate that the R^2 (goodness of fit) value is 86.03%. Furthermore, the DID and DAU variables are not significant, while DAK, DD, and IPM_{t-1} have a positive and significant effect, although relatively small on the level of HDI in the provinces in Indonesia. This means that the policy to increase Transfer funds to the regions at the provincial level, only DAK and DD affect the increase in HDI, although with a very small response. While IPM_{t-1} also has a positive effect on the current HDI. The APBD turns out to fund a lot of routine components so that it relies heavily on the state budget funds. The concept of regional autonomy in Indonesia is not for provinces but for districts and cities. While the HDI variable with the 2SLS model has a positive and not significant effect on economic growth in Indonesia

ABSTRAK

Kebijakan Desentralisasi Fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pasca Reformasi Ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya.

Tujuan utamanya untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel transfer daerah seperti DID, DAU, DAK, dan DD dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan model 2SLS. Data yang digunakan adalah data panel, dimana *cross section-nya* seluruh provinsi sedangkan *time series* menggunakan data 12 tahun (2005-2016). Metode estimasi dengan metode kwadrat terkecil (OLS) dan *autoregressive model* yang menggunakan *software* E-Views 8.

Hasil *running* data menunjukkan bahwa R^2 (*goodness of fit*) nilai sebesar 86,03%. Selanjutnya variabel DID dan DAU tidak signifikan, sedangkan DAK, DD, dan IPM_{t-1} berpengaruh positif dan signifikan walaupun relative kecil terhadap tingkat IPM pada provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya kebijakan untuk peningkatan dana Transfer ke daerah di level provinsi, hanya DAK dan DD mempengaruhi peningkatan IPM, , walaupun dengan respon yang sangat kecil. Sedangkan IPM_{t-1} juga berpengaruh positif terhadap IPM tahun sekarang. APBD ternyata banyak membiayai komponen rutinitas sehingga sangat mengandalkan kucuran dana APBN. Konsep otonomi daerah di Indonesia bukan untuk provinsi melainkan untuk Kabupaten dan Kota. Sedangkan variabel IPM dengan model 2SLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: *IPM, Tranfer Daerah, Pertumbuhan Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pemerataan pembangunan ekonomi sehingga ketimpangan dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, agenda pembangunan beralih dari sebelumnya hanya difokuskan pada pemberantasan kemiskinan termasuk dampak yang ditimbulkannya, sebagaimana tercantum pada tujuan pembangunan milenium (MDG's) tahun 2015 menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Agenda dari pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Kondisi ini dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi; yang di mana dapat menjamin masa depan dunia dan umat manusia menjadi lebih baik lagi. Prinsip dalam pelaksanaan SDG's ini merupakan: *"No One Will be Left Behind"* yang dimana Pelaksanaan Pembangunan harus memberi manfaat untuk semua dalam (UNDP; 2017).

SDG's ini terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator yang direncanakan dapat dicapai selama 15 tahun sampai dengan 2030 yang akan menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan selama 15 tahun tersebut. Untuk merubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia memulai agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional : mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta dapat mengelola sumber daya didalamnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Pencapaian kesejahteraan tersebut tercermin dari adanya peningkatan kualitas standar hidup yang semakin baik bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan cara melakukan pembangunan dari daerah pinggiran melalui kebijakan ADD (alokasi dana desa) sehingga dapat mendorong peningkatan khususnya di desa yang tertinggal maupun yang terluar telah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia saat ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan, namun terdapat beberapa faktor resiko yang bisa menempatkan Indonesia kedalam perangkap

pendapatan menengah (*middle income trap*). Maka pemerintah perlu memperbaiki sistem ekonomi yang sudah berjalan, sehingga kebijakan dalam mencapai transformasi struktural dan memunculkan berbagai inovasi guna memperoleh manfaat yang optimal dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada SDA serta tenaga kerja murah, karena pada tingkat tertentu *spillover effect* dari sumber pertumbuhan akan habis. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pembangunan sistem pendidikan menengah dan tinggi (vokasi-D3) untuk menghasilkan SDM terampil dan profesional. Dengan demikian, untuk melihat atau mengukur pembangunan yang telah dilakukan maka diperlukan indikator. Indikator tersebut diperlukan sebagai acuan dalam menilai seberapa jauh suatu negara mencapai indikator pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai penjas tentang pola, gejala, dan pengaruh yang sedang terjadi, untuk menentukan hingga taraf mana negara dianggap dapat berhasil, yang dimulai dari mengukur, menganalisis, hingga mengevaluasi sebuah perencanaan sampai pelaksanaan. Maka dari itu adapun indikator pembangunan nasional ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1-1. Indikator Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2005 – 2016

Sumber: World Bank (www.worldbank.org) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Indikator Tahun	Pendapatan Per Kapita (dalam USD)	Gini Rasio (persen)	Kemiskinan (persen)	IPM (persen)
2005	-	0,355	-	69,57
2006	-	-	-	70,10
2007	1.861	0,376	16,58	70,59
2008	2.168	0,368	15,42	71,17
2009	2.263	0,367	14,15	71,76
2010	3.167	0,378	13,33	66,53
2011	3.688	0,399	12,49	67,09
2012	3.741	0,412	11,81	67,70
2013	3.528	0,410	11,42	68,31
2014	3.442	0,41	11,11	68,90
2015	3.329	0,405	11,18	69,55
2016	3.603	0,396	10,78	70,18

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa indikator pembangunan nasional ada empat. *Pertama*, pendapatan per kapita merupakan indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari *Gross National Product* (GNP or GDP). Indikator ini merupakan bagian dari kesejahteraan manusia yang dapat diukur. Pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan yakni: mengabaikan beberapa pola distribusi pendapatan nasional dan tidak mengukur distribusi pendapatan serta pemerataan kesejahteraan maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Tabel 1-1 menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia (dalam USD) naik dari tahun ke tahun mulai dari \$ 1.861 di tahun 2007

hingga mencapai \$ 3.603 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik. Namun hal ini membuat Indonesia masuk ke dalam *middle income trap*.

Kedua, indikator Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam sebuah negara/masyarakat. Penggunaan indeks dan ukuran pemerataan kesejahteraan perlu dipertimbangkan, karena menurut para ahli pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, tidak akan memperbaiki status kaum miskin dalam (Todaro and Smith 2011;69). Pada tahap awal pembangunan, yang akan memperoleh keuntungan dan menikmati hasil-hasilnya adalah mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah. Sedangkan mereka yang di dalam kelompok berpenghasilan rendah akan tetap tertinggal sampai pada tahap pembangunan tertentu dalam kurun waktu yang lama. Indeks Gini Rasio diukur melalui Kurva Lorenz dengan koefisien berkisar antara 0 - 1. Artinya, jika koefisien gini memiliki nilai 0 berarti terjadi pemerataan yang sempurna dan jika nilai 1 terjadi ketimpangan sempurna. Tabel 1-1 dapat dilihat bahwa gini rasio Indonesia tahun 2005 mencapai 0,355. Namun di tahun 2012 gini rasio justru mengalami peningkatan menjadi 0,412. Selanjutnya tahun 2015 turun sedikit yakni berada di angka 0,405. Tetapi tahun 2016 angka gini rasio Indonesia sudah turun kembali menjadi 0,396. Hal ini membuktikan bahwasannya Indonesia mengalami tingkat pemerataan yang baik walaupun belum mencapai taraf sempurna (Todaro dan Smith,2011:255-257). Rata-rata Gini ratio Indonesia masih masuk pada level ketimpangan yang sedang karena selama 10 tahun terakhir hanya mencapai 0,392.

Ketiga, adalah tingkat kemiskinan yang merupakan indikator penting dalam pembangunan nasional. Ada asumsi yang mengatakan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan tingkat pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pemberantasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan dunia yang tercantum dalam MDG's dan SDG's. Artinya, untuk meraih keberhasilan dari pembangunan nasional, maka yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemiskinan. Dari tabel 1-1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun persentase kemiskinan di Indonesia justru mengalami penurunan. Tahun 2007, mencapai 16,58% dari seluruh total penduduk di tahun tersebut, kemudian mengalami penurunan. Walaupun penurunan yang terjadi tidak signifikan, tapi tahun 2016 tingkat kemiskinan di Indonesia hanya sebesar 10,78%. Walaupun persentase kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk maka penurunan tingkat kemiskinan justru jumlah orang miskinnya bertambah, karena secara riil terjadi penambahan jumlah penduduk di Indonesia.

Keempat, Indikator yang terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index - HDI*). *The United Nations Development Program* (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas SDM. Menurut UNDP pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan SDM, karena pembangunan diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia. Asumsi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM akan diikuti oleh terbukanya pilihan dan peluang untuk menentukan jalan hidup

(*way of life*) manusia secara bebas. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dihitung dalam IPM (HDI) dan dianggap sangat menentukan dalam pembangunan, yaitu:

- a. Rata-rata lama sekolah (*Scholling years*)
- b. Pendapatan per kapita (*Income per capita*)
- c. Angka harapan hidup (*Life expectation*)

Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *Attitude*, dan *Skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. Perkembangan IPM Indonesia untuk seluruh Provinsi dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 1-2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2010 – 2016 (Metode Baru)

Sumber: Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id)

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
Kep. Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99
DKI Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
DI Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
Nusa Tenggara Barat	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
Nusa Tenggara Timur	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13

Kalimantan Barat	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59	65.88
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
Kalimantan Selatan	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
Kalimantan Utara	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.20
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47
Sulawesi Selatan	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86	66.29
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.60
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
INDONESIA	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18

Dari tabel 1-2 di atas, bahwa IPM (*Human Development Index-HDI*) di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2016 berkisar diangka 66,53 s/d 70,18 relatif naik dari tahun ke tahun. Nilai IPM antar provinsi, masih banyak ditemukan *gap* (ketimpangan) untuk provinsi-provinsi yang sudah mandiri dengan yang belum mandiri. Hal ini menunjukkan proses pemerataan pembangunan belum berjalan secara optimal.

Transfer ke Daerah (TkD) dalam APBN terdiri dari: Dana Perimbangan (Daper) dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Otsus). Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), di tahun 2015 sebesar Rp 362,9 Triliyun, untuk tahun 2016 sebesar Rp 19,4 Triliyun, pada tahun 2017 sebesar Rp 40,1 Triliyun sedangkan rencana di tahun 2018 sebesar Rp 40,14 Triliyun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di tahun 2015 sebesar Rp 35,8 Triliyun, untuk tahun 2016 sebesar Rp 23,8 Triliyun, pada tahun 2017 sebesar Rp 58,3 Triliyun sedangkan rencana di tahun 2018 sebesar Rp 62,4 Triliyun. Secara filosofi DAU dan DAK digunakan sebagai alat pemerataan antar daerah (*horizontal imbalance*) sedangkan DBH digunakan sebagai pemerataan fiskal antara pusat dan daerah sekaligus sebagai koreksi atas pengeksploitasi SDA masing-masing daerah, dalam (Kemenkeu;2017).

Transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah dilaporkan tidak terkendali karena ada kesalahan dalam penetapan jumlahnya. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan ada penyimpangan penggunaan sebagian dana perimbangan yang bisa merugikan keuangan negara. Dana perimbangan pusat dan daerah sangat berperan sebagai perekat NKRI, tetapi

menjadi sangat sensitif. Jika tidak berhati-hati dalam mengelolanya, bisa rawan penyalahgunaan. Berdasarkan data Kemenkeu, pada tahun 2011 terdapat 124 daerah yang 50% lebih anggarannya dialokasikan untuk belanja pegawai, jumlahnya meningkat menjadi 302 daerah pada APBD 2012, bahkan 16 daerah diantaranya menganggarkan belanja pegawainya di atas 70%.

Prinsip *money follow function*, membuktikan bahwa transfer ke daerah justru berbanding terbalik dengan urusan yang didesentralisasikan. Sebanyak 31 urusan pemerintah atau 70% nya di serahkan ke daerah, sementara dari segi proporsi anggaran yang ditransfer masih dikisaran 30%. Dengan postur anggaran seperti yang disebutkan di atas, maka tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik akan sulit dicapai, meski otonomi daerah telah berjalan dua dasawarsa. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang berasal dari APBD masih menambah hambatan dalam pencapaian tujuannya. Jadi, harus ada pengawasan yang independent dan kebijakan yang lebih ketat terhadap mekanisme transfer daerah.

Berdasarkan pada fakta dan kebijakan fiscal yang telah ditempuh maka penelitian akan membuktikan seberapa besar pengaruh dari komponen dana dari Transfer ke daerah dapat mempengaruhi target pembangunan ekonomi dalam hal ini IPM di seluruh provinsi di Indonesia dalam periode kepemimpinan Presiden SBY dan JKW.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teoritis

Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral kegiatan pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, jadi pembangunan akan mengangkat kualitas hidup masyarakat. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dalam pembangunan (Todaro dan Smith, 2011:25): (1) Kecukupan, (2) Harga Diri, dan (3) Kebebasan. Badan-badan internasional (*World Bank* dan *International Monetary Fund*) telah menggunakan indikator pendapatan per kapita untuk melihat dan membandingkan kinerja perekonomian negara-negara diseluruh dunia. Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan beberapa pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan fiscal yang dijalani oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (1) Teori Makro: Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro,

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999): pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; serta pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. (2) Teori Mikro: Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesebroto:2001).

Beberapa ahli demografi berpendapat, rendahnya IPM karena terjadi disparitas akses terhadap hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata antar provinsi di Indonesia, diperlukan campur tangan pemerintah pusat melalui kebijakan desentralisasi fiskal yakni melalui mekanisme transfer ke daerah (TkD). Hal ini berlaku sejak Pemerintah Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah tahun 2000, dimana dari sisi kewenangan pemerintah pusat diturunkan kepada kota dan kabupaten. Selanjutnya diikuti dengan desentralisasi fiskal dari sisi keuangannya. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Januari 2001 hingga saat ini dan mengubah pola dan system dari APBN Indonesia.

Pengelolaan dana daerah harus dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya bahwa penyerahan kewenangan kepada daerah, pemerintah pusat juga wajib mengalihkan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas dari *Money Follow Function*. Selain penyerahan sumber-sumber pembiayaan tersebut kepada daerah, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan hukum nasional yang berlaku. Namun dengan demikian, heterogenitas daerah di Indonesia sangat beragam, beberapa daerah memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, dan beberapa daerah lainnya memiliki sumber pajak yang besar. Namun hampir sebagian besar daerah lainnya yang tidak memiliki kekayaan SDA maupun pajak yang memadai sehingga pemerintah harus ikut campur tangan dalam membantu daerah tersebut melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TkD).

2.2. Tinjauan Literatur

Flypaper Effect diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1997). Istilah ini kemudian dikembangkan oleh Dollery and Worthington (1995) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer untuk memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pengurangan pajak. Definisi *Flypaper Effect* dalam Maimunah (2006:37), bahwa kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) dengan menggunakan komponen DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, dengan pendekatan dari PAD.

Sementara itu, Gorodnichenko (2011:38) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* dapat menjelaskan bahwa dapat dalam dua versi, yaitu:

- 1) Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.
- 2) Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian tentang *flypaper effect* dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan dalam dua aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokrasi meneliti *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Model birokratik menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. Model ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh Amilcare Puviani yang menggambarkan tentang ilusi fiskal terjadi saat pembuatan keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi dengan menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan Negara atau daerah (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu.

Sedangkan Oates (1999) dalam Listiorni (2012) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya pada harga barang publik yang akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka kenaikan transfer sebagai akibat dari kenaikan pajak bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang anggaran pemerintah.

Pendekatan *flypaper effect* dikemukakan oleh Bradford (1971) memprediksikan bahwa hibah kepada pemerintah daerah setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Artinya kenaikan transfer ke daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakatnya, karena setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara linier. Walaupun dalam praktiknya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Perimbangan untuk pengeluaran belanjanya. Sehingga seolah menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontra prestasi yang tidak sesuai. Pemerintah Daerah Otonomi dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari transfer Pemerintah Pusat, bukan dari PAD nya sendiri. Selain itu, *flypaper effect* juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang.

Widarjono (2006) menemukan adanya *flypaper effect* pada wilayah barat dan timur Indonesia. Ia menunjukkan bahwa *flypaper effect* yang terjadi di daerah timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Irian) lebih besar daripada daerah barat (Sumatera dan Jawa). Temuan ini menunjukkan pengaruh transfer (*grants*) terhadap belanja daerah lebih signifikan dibandingkan pengaruh terhadap belanja daerah.

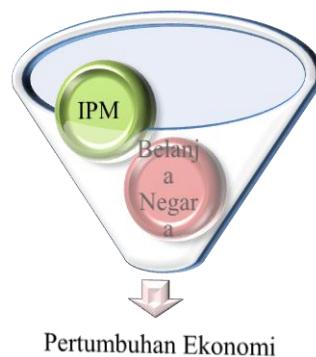
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi nilai Transfer Daerah dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: (1) Dana Insentif Daerah, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus, (4) Dana Desa.



Gambar 2-1. Kerangka Konseptual Model -1

Dalam model-2, variabel DID, DAU, DAK dan DD (belanja Negara/daerah) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap nilai IPM, yang kemudian IPM akan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel terikat.



Gambar 2-2. Kerangka Konseptual Model -2

Dalam model yang kedua ini, variabel Belanja Negara secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat melalui IPM.

Sedangkan Hipotesa dari model ini sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Desa (DID), dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada seluruh provinsi di Indonesia.
2. Diduga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara IPM yang dipengaruhi oleh belanja Negara/daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk pada kategori metode kuantitatif kausalitas dengan menggunakan data Panel dalam Arifiento (2012) berdasarkan waktu dimana terdapat 12 tahun (2005-2016) dan dengan *cross section* sebanyak 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan jika berdasarkan bentuk maka data kuantitatif dalam Nacchrowi (2002), dan berdasarakan sumber adalah data sekunder. Secara lebih dalam variable yang akan digunakan dapat dilihat pada table data definisi operasional yakni :

Tabel 3-1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Nilai Indeks dari IPM atau HDI	BPS (Badan Pusat Statistik) – www.bps.go.id
DAU (Dana Alokasi Umum)	Dana APBN untuk kegiatan umum dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DID (Dana Insentif Daerah)	Dana APBN untuk kegiatan daerah dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DAK (Dana Alokasi Khusus)	Dana APBN untuk kegiatan khusus dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
DD (Dana Desa)	Dana Alokasi Desa dari APBN untuk kegiatan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id
Belanja Negara (BN)	Total Belanja Negara/daerah di APBN/APBD untuk keperluan negara/daerah dalam satuan Milyar rupiah	Kementerian Keuangan – www.kemenkeu.go.id

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Nilai kenaikan ekonomi yang diukur dari IPM dan Belanja Negara.	BPS (Badan Pusat Statistik) – www.bps.go.id

Penelitian ini mengenai pengaruh nilai dari mekanisme Transfer ke Daerah terhadap peningkatan nilai *Human Development Index* dengan objek penelitian seluruh Provinsi di Indonesia dan juga dengan kurun waktu mulai dari pemerintahan SBY sampai Jokowi (dari tahun 2005 sampai tahun 2016) bagi setiap Provinsi di Indonesia. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Estimasi I: Pengaruh Transfer Daerah terhadap IPM.

$$IPM_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot DID_{rt} + \alpha_2 \cdot DAU_{rt} + \alpha_3 \cdot DAK_{rt} + \alpha_4 \cdot DD_{rt} + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-1)$$

Dimana, (IPM_{it}) Indeks Pembangunan Manusia, (r) Provinsi, (t) tahun (2005-2016), (DID_{rt}) Dana Insentif Daerah, (DAU_{rt}) Dana Alokasi Umum, (DAK_{rt}) Dana Alokasi Khusus, (DD_{rt}) Dana Desa.

Berdasarkan variabel-variabel pada Model-1, bahwasannya Pertumbuhan Ekonomi dapat ditingkatkan melalui IPM sebagai eksogen yang dipengaruhi secara endogen dengan Belanja Negara (BN), sehingga akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Jadi model estimasi-2 dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara IPM melalui BN terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) yakni sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{rt} (BN_{rt}) + \varepsilon_{rt} \dots\dots\dots(3-2)$$

Penelitian mengenai implementasi kebijakan transfer daerah terhadap pembangunan nasional untuk Provinsi-provinsi di Indonesia (periode kepemimpinan SBY dan JKW tahun 2005 – 2016). Dengan Metode estimasi OLS harus memenuhi sifat estimator yang BLUE (*Best- Linear- Unbiased- Estimated*) dalam Gujarati (2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif dari Model

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel data, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4-1. Statistik Deskriptif Model IPMSumber: Data Diolah dengan *Eviews- 8*

	IPM	DID	DAU	DAK	DD
Mean	67.27184	3.562574	699.9486	126.3828	4534.999
Median	68.64500	0.000000	642.3650	53.80500	4569.110
Maximum	79.60000	42.40000	3066.050	1493.680	9037.940
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	10.38229	9.010446	434.7828	193.8054	2733.182
Skewness	-5.307136	2.695529	0.998216	3.346711	-0.080479
Kurtosis	34.83090	9.359582	5.483741	17.10000	2.042152
Jarque-Bera	19139.78	1181.632	172.6300	4141.401	16.03746
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000329
Sum	27446.91	1453.530	285579.0	51564.17	1850280.
Sum Sq. Dev.	43871.35	33043.57	76937700	15287133	3.04E+09
Observations	408	408	408	408	408

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan dalam rentang tahun 2005-2016, nilai rata-rata IPM untuk Provinsi di Indonesia sebesar 67.27 artinya bahwa dalam pertahun IPM bernilai 67.27, sementara nilai mean dari variabel DID hanya sebesar 3.56 ini berarti bahwa dalam kurum waktu 12 tahun DID yang di berikan kepada Provinsi di Indonesia sekitar 3,56 Milyar rupiah, sementara rata-rata variabel DAU mencapai Rp 699.95 Milyar untuk setiap provinsi di Indonesia per tahun. Selanjutnya rata-rata variabel DAK mencapai Rp 126.38 Milyar, yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah/provinsi per-tahunnya. Terakhir, nilai mean pada variabel DD mencapai Rp 4534.99 juta, dimana anggaran dana desa yang diberikan pemerintah pusat di seluruh provinsi per tahunnya.

Maka secara garis baris bahwa alokasi dana transfer ke daerah memiliki nilai yang cukup besar dengan *trend* yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat ini bahwa kebijakan ADD (Alokasi dana desa) dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang dimulai dari daerah pinggiran maupun terluar baik secara fisik, ekonomi, social dan lain sebagainya.

Tabel 4-2. Statistik Deskriptif Model Pertumbuhan EkonomiSumber: Data diolah dengan *Eviews-8*

	PE	IPM
Mean	5.894853	67.27184
Median	5.830000	68.64500
Maximum	70.00000	79.60000
Minimum	-17.10000	0.000000
Std. Dev.	4.987361	10.38229
Skewness	5.880367	-5.307136
Kurtosis	75.46100	34.83090

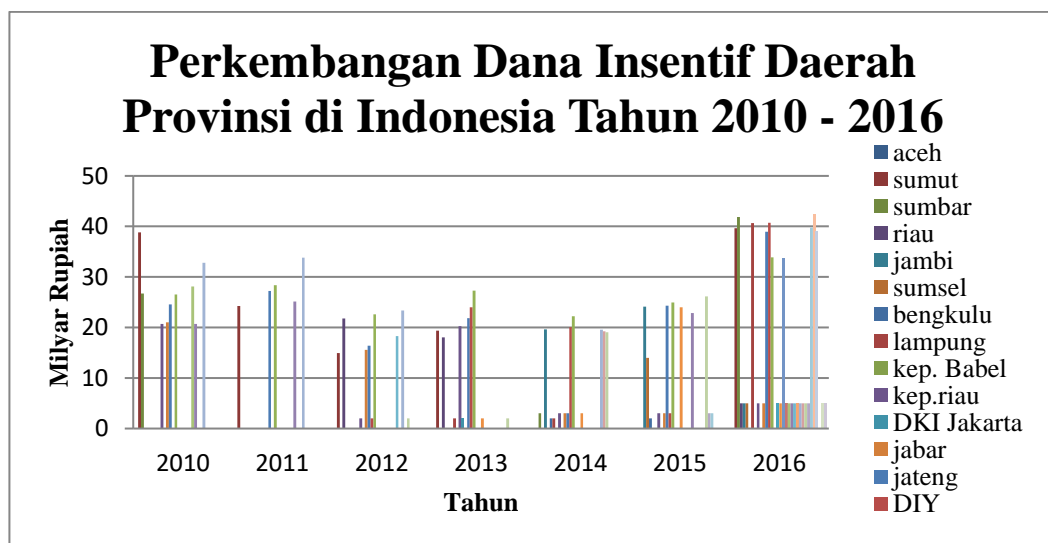
Jarque-Bera	91611.49	19139.78
Probability	0.000000	0.000000
Sum	2405.100	27446.91
Sum Sq. Dev.	10123.62	43871.35
Observations	408	408

Dari hasil statistik deskriptif diatas, nilai mean dari variabel PE sebesar 5.89% artinya pertumbuhan ekonomi setiap provinsi per-pertahunnya. Sedangkan nilai rata-rata dari IPM nya sebesar 67,27 untuk capaian salah satu indikator pembangunan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia per tahunnya.

4.2. Perkembangan Komponen Transfer ke Daerah

4.2.1. Perkembangan Dana Insentif Daerah (DID)

Transfer ke Daerah merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat besar antar daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk transfer ke daerah yang diberikan oleh pemerintah ialah Dana Insentif Daerah, dimana dana ini tidak diberikan untuk semua daerah/provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan Dana Insentif Daerah ini digunakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang dialokasikan kepada daerah. Alokasi Dana Insentif Daerah ini bertujuan untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik. Berikut merupakan grafik perkembangan daerah-daerah yang memperoleh DID.



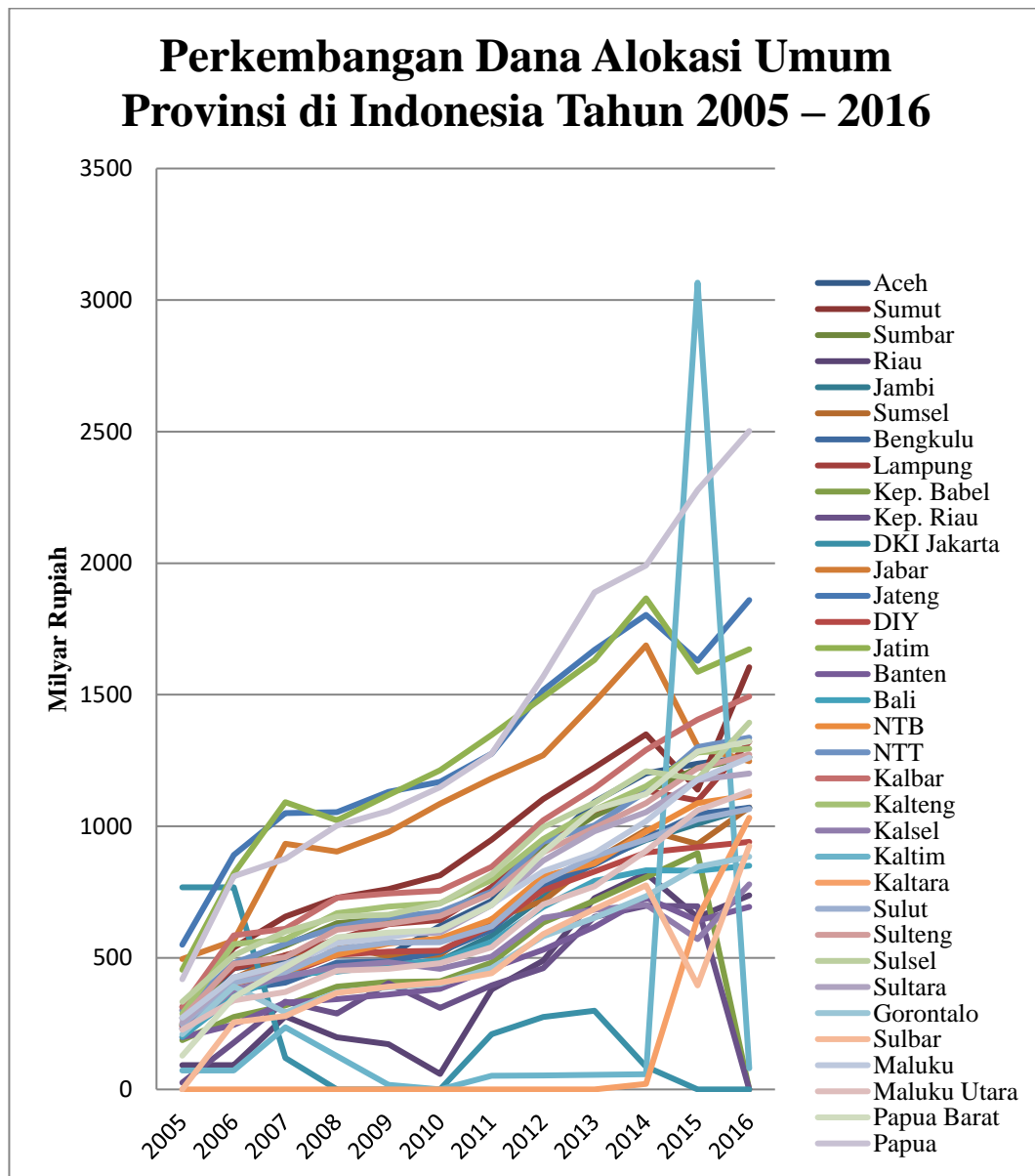
Gambar 4-2 Perkembangan Dana Insentif Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010 - 2016

Sumber: Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

DID yang dikeluarkan pemerintah tidak diberikan untuk semua daerah/provinsi yang ada di Indonesia, melainkan dalam setiap tahunnya hanya beberapa provinsi saja yang menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana insentif daerah. Seperti yang terlihat pada gambar diatas, pada tahun 2011 merupakan tahun dimana jumlah provinsi yang mendapatkan dana insentif daerah terendah yang dimana pada tahun ini hanya 5 provinsi saja yang mendapatkan DID. Walaupun demikian, bukan berarti beberapa provinsi lain tidak mendapatkan dana insentif dari pemerintah, hanya saja dana insentif daerah yang diberikan pemerintah langsung kepada kabupaten/kota yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Gambar ini juga menunjukkan pada tahun-tahun terakhir (2014 hingga 2016) pemberian dana insentif daerah ini mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi banyaknya provinsi/daerah yang mendapatkannya. Terkhusus di tahun 2016 dapat dilihat bahwasannya hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan dana insentif daerah ini. Hal ini terjadi didalam kepemimpinan Jokowi-JK yang dimana selaras dengan nawa cita Jokowi-JK yaitu untuk membangun dari desa serta daerah-daerah terpinggir. Yang dimana, untuk membangun atau untuk meningkatkan kualitas daerah-daerah pinggiran sangat memerlukan dana yang besar, terutama lagi jika daerah-daerah tersebut sangat jauh tertinggal baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang tidak memadai. Maka dari itu diperlukannya dana yang besar untuk membangun ketertinggalan suatu daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya dana insentif daerah ini dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan.

4.2.2. Perkembangan Dana Alokasi Umum

Transfer daerah berikutnya masuk dalam Dana Perimbangan itu terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Tujuan adanya pengalokasian dan perimbangan ialah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga akan tercipta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dana perimbangan yang saya gunakan ialah Dana Alokasi Umum (DAU), dimana DAU ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU ini secara nasional sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang diberikan terkhusus kepada daerah-daerah pemekaran. Oleh karena itu, besaran DAU yang dikeluarkan pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari grafik perkembangan DAU provinsi di Indonesia berikut:



Gambar 4-3. Perkembangan Dana Alokasi Umum Provinsi di Indonesia Tahun 2005 - 2016

Sumber: Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan diolah

Dari gambar 4.3 diatas, *trend* pengalokasian DAU untuk seluruh provinsi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dari gambar tersebut bahwa alokasi DAU terbesar terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur yang dimana dana yang dikeluarkan pemerintah mencapai 3.066,05 Milyar rupiah. Terbesar berikutnya di tahun 2016 adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 2.502,45 Milyar rupiah. Selain itu, untuk provinsi pemekaran yang baru seperti Kalimantan Utara juga diberikan DAU tiga tahun terakhir, yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup drastis atau signifikan yaitu di tahun 2014 dana DAU yang diberikan sebesar 20,57 Milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2015 DAU meningkat sangat banyak yaitu menjadi 651,25 Milyar rupiah serta meningkat cukup signifikan di tahun 2016 yaitu alokasi DAU yang diberikan menjadi 1032,46 Milyar rupiah.

Peningkatan alokasi DAU yang terlihat pada gambar tersebut sangat bagus untuk membantu keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Namun, tingginya alokasi DAU ini membuktikan bahwasannya tingkat kemandirian daerah di Indonesia ini sangat kecil karena sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Seharusnya, DAU yang dialokasikan pemerintah pusat harus menurun setiap tahunnya karena pemerintah pusat mengharapkan daerah itu telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya karena daerah telah diberikan kebebasan dalam hal keuangannya untuk memenuhi kebutuhannya.

4.2.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda DAU yang diberikan untuk seluruh provinsi di Indonesia, DAK hanya diberikan untuk beberapa provinsi saja yang sudah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DAK diberikan oleh pemerintah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, prasarana daerah tertinggal, energi pedesaan, perumahan dan pemukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Selain itu juga, DAK diberikan pemerintah untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan daerah untuk meningkatkan atau menyelaraskan kepentingan nasional. DAK juga dialokasikan pada daerah tertinggal dalam rangka melanjutkan keberpihakan yang digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur.

Provinsi-provinsi/daerah-daerah yang mendapatkan DAK harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang dimana kriteria tersebut terdiri dari 3 komponen, yaitu: (1) kriteria umum, (2) kriteria khusus, dan (3) kriteria teknis. Kriteria umum dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan kriteria khusus dilihat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah seperti aturan PERDA yang termasuk kedalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK. Selain daerah tertinggal, daerah yang diprioritaskan mendapatkan DAK ialah daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, daerah pariwisata. Kriteria khusus ini dilihat dari indeks kewilayahan oleh menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Lembaga terkait. Sedangkan untuk kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah terkait dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintah, kelautan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, serta sarana dan prasarana pedesaan, dan perdagangan.

4.3. Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dari ke-2 model dimana faktor penentu dari perubahan IPM akan terlihat melalui variable transfer ke daerah untuk 34 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4-3. Ringkasan Hasil Pengolahan Data Konsentrasi Ekonomi

No	Variabel/ Items	Model -1		
		OLS	Ln-OLS	AR(1) -OLS
1	DID	(0.053497)	(-0.003077)	(0.053497)
		0.06099	0.004943	0.06099
2	DAU	(0.000539)	(-0,25027)**	(0.000539)
		0.001294	0.00978	0.001294
3	DAK	(0.006214)**	(-0,010253)*	(0.006214)**
		0.002701	0.007089	0.002701
4	DD	(0.000445)**	(-0.008195)*	(0.000445)**
		0.000196	0.004638	0.000196
5	(AR)1	-	-	(0.880121)***
		-	-	0.01836
5	Constanta	(63.90178)***	(4.516179)***	(68.54708)***
		1.269892	0.07454	1.660283
6	N_Province/time	34	29	33
		12	7	11
7	Number_obsv	408	83	374
8	Adj_R Squared	0.016425	0.120439	0.860302
9	R_correlation	0.12816	0.347043	0.927525
10	DW_Test	0.317026	0.206833	2.198678
11	Uji_F (statistic)	2.69958	3.807091	2298.039
	Prob	0.030373**	0.007028***	0.000000***

Keterangan pada α Level Signifikansi (***)1%,(**)5% dan (*)10% s/d 15%

(dalam kurung standar error)

Model -1 dengan OLS ternyata menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan masih terdapat pelanggaran asumsi asumsi klasik yakni multikolinierity dan autokorelasi. Hasil ini juga jika dilihat dari komponenpenaksiran masih jauh dari yang seharusnya dimana $R^2_{adjusted}$ masih sangat rendah sehingga variabel bebas yang dipilih sangat kecil kemampuannya untuk menjelaskan

(*goodness of fit*) dengan variabel terikatnya. Pada model-1 ketika *ditreatment* dengan menambah logaritma natural (Ln) agar terbebas dari autokorelasi yang dapat dilihat dari DW test.

Ternyata pada model ini masih terdapat penyakit yang hampir sama yakni multikolinierity dan autokorelasi, sehingga model masih jauh dari BLUE. Berdasarkan pada fakta diatas, maka model ditambahkan lagi treatment nya dengan cara menambah autoregressive (AR) dalam model OLS yang pertama, dimana lag dari variabel terikat yakni IPM_{t-1} akan mempengaruhi IPM_t . Hasil running data membuktikan bahwa model yang menggunakan AR telah menghasilkan DW yang sudah terbebas dan dengan R^2 yang cukup besar yakni 86% utk *goodness of fit*nya. Artinya 86% variabel DID, DAU, DAK dan DD mampu menjelaskan variabel IPM, sisanya sebesar 14% akan di jelaskan oleh variabel diluar model. Selanjutnya untuk penaksiran model dari Koefisien korelasi (R) memiliki nilai sebesar 92,75%, dimana terdapat hubungan yang sangat tinggi secara simultan antara variabel DID, DAU, DAK dan DD terhadap IPM di Indonesia selama 12 tahun terakhir, sisanya hanya 7,25% memiliki hubungan dengan variabel diluar model.

Dengan demikian bahwa variabel DAK dan DD ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM di provinsi se-Indonesia. Walaupun pengaruhnya sangat kecil karena jika terjadi kenaikan 10% DAK dan DD pada setiap tahun justru meningkatkan IPM hanya sebesar dibawah 1%, dimana untuk DAK pengaruhnya hanya 0,4% dan DD hanya 0,02%.

Secara ekonomi dapat diartikan bahwa transfer ke daerah jika dikucurkan melalui provinsi justru tidak memiliki respon yang besar, karena pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa OTDA di Indonesia justru berada di level Kota dan Kabupaten, sehingga kemungkinan pengaruh yang lebih besar jika dilihat dari data IPM kota Kabupaten beserta kucuran dana yang diterima dari komponen Transfer ke daerah untuk menambah penerimaan pada APBD kota dan Kabupaten.

Untuk Model-2, dimana IPM melalui dana Transfer ke daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi se- Indonesia. Walaupun pada model ini sudah terbebas dari autokorelasi. Jadi kebijakan transfer daerah kemungkinan akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk data cross sectionnya kota atau kabupaten di Indonesia.

Uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect lebih signifikan dibanding random effect. Hal ini menunjukan bahwa terdapat korelasi antara konstanta dengan cross section dalam hal ini provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bahwa tipe daripada provinsi misalnya *size of population*, besarnya PDRB yang dihasilkan dan *Income percapita* akan mempengaruhi IPM yang ada di wilayah tersebut. Kondisi menempatkan pemerintah untuk fokus pada daerah yang indikator tersebut berada dibawah rata-rata secara nasional, sehingga kualitas IPM akan dapat ditingkatkan dalam mencapai pemerataan SDM yang berkualitas.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAK dan DD sangat mempengaruhi peningkatan IPM untuk wilayah provinsi di Indonesia, walaupun responnya relatif rendah. Tapi kebijakan pemerintah untuk komponen ini berhubungan erat dengan infrastruktur fisik yang akan menjembatani non-fisik seperti akses menuju ke sekolah dan puskesmas agar mendapatkan jasa pendidikan serta kesehatan. Jadi pembangunan fisik ini justru akan meningkatkan lama bersekolah (*schooling years*) dan tingkat harapan hidup bagi masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Pemerintah sebagai pengembalian amanah yang tercantum dalam konstitusi.

Pendekatan *flypaper effect* telah terjadi di Indonesia, dimana hibah kepada pemerintah daerah setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat melalui kenaikan IPM. Artinya kenaikan transfer ke daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakatnya, karena setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara linier. Walaupun faktanya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Perimbangan untuk pengeluaran belanjanya secara rutin. Sehingga ilusi fiskal dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan meraih kontra prestasi yang tidak sesuai. Pemerintah Daerah Otonomi dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar untuk transfer Pemerintah Pusat, bukan dari PAD nya sendiri. Selain itu, *flypaper effect* juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah transfer ke daerah untuk wilayah provinsi dapat dikurangi khususnya untuk DID dan DAU, karena tidak mempengaruhi secara signifikan dalam mendorong tercapainya target dari pembangunan ekonomi khususnya kualitas SDM melalui IPM. Dana ini kemungkinan lebih efektif lagi jika diberi lebih banyak untuk wilayah Kabupaten dan Kota karena program yang dipilih akan langsung diterima oleh penduduknya.

Program kebijakan Dana Desa akan terus dilanjutkan karena makin banyak desa yang sudah memiliki usaha yang menjadikan pendadapataan desa menjadi lebih tinggi, khususnya berbasis wisata desa (*torismn village*) yang masih banyak didominasi pada wilayah Pulau Jawa. Maka peran dari PTN dan PTS dapat mengkombinasi program Pengabdian Masyarakat dan KKN dengan kebijakan ADD di seluruh desa di Indonesia sehingga menjadi desa yang mandiri seccara ekonomi dan dapat mencegah arus urbanisasi.

Keterbatasan dari penelitian ini masih pada wilayah Provisni, padahal kebijakan OTDA sudah berada di wilayah Kabupaten dan Kota. Jadi untuk pengembangan lebih lanjut sebaiknya model estimasi yang dibangun harus ccross sectionnya menggunakan daerah kota dan kabupaten kemudian menambah variable dummy geografi agar ada cirri khas dari riset lanjutan yang mengarah juga pada Ekonomi Geografi.

Penghargaan

Terimakasih saya ucapka pada Rizky Ananda yang telah membantu saya dalam mengumpulkan dan mengolah data dengan software EViews-8. Peneitian ini dibuat secara mandiri guna mendukung penelitian yang sedang saya lakukan untuk Penelitian Strategi Nasional 2018 Kemenristek Dikti tentang kebijakan BUMDes untuk pembangunan ekonomi di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ariefianto, Moch. Doddy.(2012),” Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan E-Views”, Jakarta:Erlangga

Boediono.(1999);” Ekonomi Makro”, BPFE-UGM, Yogyakarta

Gujarati, Damodar, (2000), “ Dasar-dasar Ekonometrika”, Edisi Ketiga Jilid 1. Jakarta:Erlangga

Hermawan, Dudi. (2007). "Analisis Pelaksana Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah (Study Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)", Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.

Kuncoro, Mudrajad(2014)." Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah", Edisi 3. Jakarta, Erlangga

Mangkoesoebroto, Goeritno (2011); " Ekonomi Publik", BPFE UGM, Yogyakarta

Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Modern. Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta:Erlangga.

Badan Pusat Statistik. Angka Kematian Bayi Provinsi di Indonesia. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017

Badan Pusat Statistik. Indeks Gini Ratio. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017

Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017

Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Per Capita Indonesia. www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Desember 2017

Bank Indonesia. 2013. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional, Laporan Nusantara, Vol. 8 No.3. www.bi.go.id

Egawa, Akio. 2013. Will Income Inequality Cause a Middle Income Trap in Asia. Jepang: Bruegel Working Paper

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145/PMK.07/13 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2014.